

RENSTRA 2025-2029

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol. Penyusunan Renstra ini mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan dinamika tantangan global, nasional, dan lokal yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan masukan, saran, dan data yang diperlukan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan program kerja Bakesbangpol secara efektif, terukur, dan akuntabel, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasuruan, September 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

IMAM SUBEKTI, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19730709 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL……. iii

BAB I. PENDAHULUAN…….. 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik..... 7

2.2 Permasalahan dan Isu strategis..... 19

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK……. 22

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22

3.2 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 23

3.3 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 24

3.4 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik…….. 25

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 27

BAB V. PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin….. 8

TABEL 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan…….. 9

TABEL 2.3 Klasifikasi Pegawai ASN dan non ASN Berdasarkan tingkat Pendidikan…… 9

TABEL 2.4 Daftar nama barang Bakesbangpol…….. 10

TABEL 2.5 Pencapaian kinerja pelayanan Bakesbangpol……. 15

TABEL 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bakesbangpol… 17

TABEL 2.7 Teknik menyimpulkan isu strategis Bakesbangpol….. 20

TABEL 3.1 Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol……. 23

TABEL 3.2 Penahapan Renstra Bakesbangpol…… 25

TABEL 3.3 Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Bakesbangpol……. 25

TABEL 4.1 Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Bakesbangpol……. 28

TABEL 4.2 Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Bakesbangpol……. 36

TABEL 4.3 Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung Program prioritas pembangunan Daerah…… 58

TABEL 4.4 Indikator kinerja Utama Bakesbangpol…….. 59

TABEL 4.5 Indikator kinerja Kunci Bakesbangpol…… 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, peran Bakesbangpol menjadi semakin penting dan strategis, terutama dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan nasional, dan memperkuat wawasan kebangsaan serta ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa seperti radikalisme, intoleransi, disintegrasi sosial, serta berbagai bentuk gangguan keamanan non-konvensional memerlukan respon kebijakan yang terarah, terukur, dan adaptif.

Renstra ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan program kerja Bakesbangpol dalam lima tahun ke depan, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi. Selain itu, Renstra juga menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sinergi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, damai, dan kondusif bagi pembangunan.

Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta mengintegrasikan hasil evaluasi Renstra sebelumnya, isu-isu strategis terkini, dan masukan dari para pemangku kepentingan.

Dengan adanya Renstra Bakesbangpol Tahun 2025–2029 ini, diharapkan kinerja kelembagaan dapat lebih fokus, terarah, dan akuntabel dalam mewujudkan stabilitas politik dan kehidupan berbangsa yang harmonis di tingkat daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan dan arah strategis Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan selama periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah, serta sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk :

a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan nasional/daerah ke dalam strategi dan program kerja Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga secara sistematis dan terukur;
b. Mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan, antara dokumen perencanaan nasional/daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat unit kerja;
c. Memberikan arah dan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan;

d. Mendukung pencapaian target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD/RPJMN Tahun 2025–2029;
e. Menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat informasi tentang layanan utama yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu juga menjelaskan tujuan mengidentifikasi hambatan atau tantangan nyata yang dialami Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bagian ini juga bertujuan untuk merumuskan isu-isu utama yang bersifat strategis, artinya berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta harus ditangani melalui kebijakan prioritas dalam Renstra.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan berisi rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan visi-misi Wali Kota. Strategi menjelaskan cara atau pendekatan utama yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan merupakan penjabaran lebih operasional dari strategi, sebagai panduan dalam penentuan program dan kegiatan. Arah kebijakan bersifat lebih konkret, bisa menyebut sektor, bidang, atau ruang lingkup kerja.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian Program, Kegiatan dan Subkeg beserta indicator , target dan pagu indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

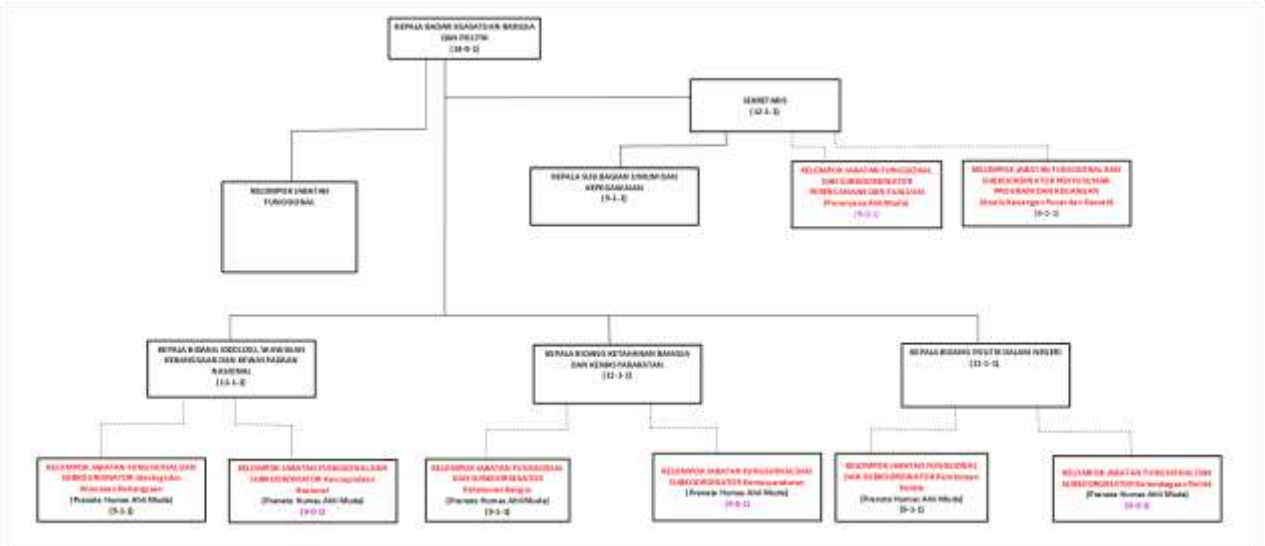
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 adalah
   a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
   c. pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
   d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
   f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan layanan antara lain :

1. Fasilitasi kegiatan pembinaan meliputi : 1) Pembinaan organisasi kemasyarakatan 2) Pembinaan wawasan kebangsaan 3) Pembinaan Ideologi Pancasila 4) Deteksi dini konflik sosial 5) Pembinaan Pendidikan politik 6) Pembinaan penghayat kepercayaan dan Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya 7) Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan 8) Fasilitasi PEMILU
2. Kegiatan pelayanan meliputi : 1) Pelayanan ijin surat Penelitian magang dan PKL 2) Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Masyarakat

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022

B. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dukungan SDM

Sumber daya Manusia yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sejumlah 33 orang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN (Tenaga Kontrak dan THL)

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A.	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	7	7	14
	2. PPPK	4	1	5
	TOTAL ASN	11	8	19
B	Non. ASN			
	1. Tenaga Kontrak (TK)	0	1	1
	2. Tenaga Harian Lepas (THL)	13	4	17
	TOTAL Non ASN	13	5	18
	TOTAL KESELURUHAN	24	13	37

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Berdasarkan table 2.1, pegawai Bakesbangpol Kota Pasuruan didominasi oleh pegawai laki-laki, yang mana total pegawai laki-laki berjumlah 26 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 13 orang.

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	3	-	3
2	Golongan III	8	5	13
3	Golongan II	1	2	3
	JUMLAH	12	7	19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat, berdasarkan golongan pegawai ASN Bakesbangpol terbanyak adalah golongan III.

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai ASN dan Non ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	ASN		NON ASN		JUMLAH
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	S2	4	1	-	-	5
2	S1	5	5	5	3	18
3	D3	1	-	-	-	1
4	Sekolah Menengah Atas/sederajat	1	1	9	-	11
5	Sekolah Menengah Pertama/sederajat	-	-	1	-	1
	JUMLAH	11	7	15	3	37

Berdasarkan tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan pegawai Bakesbangpol paling banyak di lulusan S1 untuk pegawai ASN, sedangkan untuk Non ASN paling banyak di lulusan SMA.

Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan sarana dan prasarana berupa barang inventaris Peralatan dan Mesin yang tertuang dalam lampiran Kartu Inventaris Barang (KIB) B; Gedung dan Bangunan yang tertuang dalam KIB C; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tertuang dalam KIB D.

Tabel 2.4 Daftar Nama Barang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Toyota Rush	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2019
2	Toyota Avanza	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2009
3	Sepeda Motor Honda	6 unit	Baik : 6 unit Tahun Pembelian : 2006, 2007, 2009, 2010, 2016
4	Laptop	7 unit	Baik : 5 unit Tahun Pembelian : 2020, 2021, 2023 Rusak Berat : 2 unit Tahun Pembelian : 2017
5	Notebook	10 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian 2019 Rusak Berat : 9 unit Tahun Pembelian : 2011, 2012, 2015, 2016, 2018
6	PC	22 unit	Baik : 7 unit Tahun Pembelian : 2018, 2019, 2020 Rusak Berat : 15 unit Tahun Pembelian : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
7	Printer	30 unit	Baik : 15 unit Tahun Pembelian : 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 Rusak Berat : 15 unit Tahun Pembelian : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
8	Scanner	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2019
9	Camera Electronic	1 unit	Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2014

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
10	Camera Film	1 unit	Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2013
11	Camera Digital	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2023
12	Pesawat Telephone	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2017
13	Faximile	1 unit	Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2015
14	AC	20 unit	Baik : 7 unit Tahun Pembelian : 2022, 2023 Rusak Berat : 13 unit Tahun Pembelian : 2013, 2014, 2015, 2016, 2018,
15	CCTV	2 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2023 Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2017
16	Mesin Absensi	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2016
17	Layar LCD Projector	2 buah	Rusak Berat : 2 buah Tahun Pembelian : 2015, 2018
18	Brangkas	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2015
19	Router	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2016
20	Peralatan Jaringan Lainnya	1 unit	Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2010
21	Peralatan Komputer Lainnya	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2016
22	Televisi	8 unit	Rusak Berat : 8 unit Tahun Pembelian : 2008, 2010, 2015, 2016, 2017
23	Mesin Hitung Manual	2 unit	Baik : 2 unit Tahun Pembelian : 2015
24	Lemari Besi	9 buah	Baik : 5 buah Tahun Pembelian : 2016, 2018, 2019 Rusak Berat : 4 buah Tahun Pembelian : 2009
25	Lemari Kayu	1 buah	Baik : 1 buah Tahun pembelian : 2017
26	Lemari Kaca	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2017
27	Filling Kabinet	4 buah	Baik : 4 buah Tahun Pembelian : 2014, 2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
28	Papan Visual / Papan Nama	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembuatan : 2017
29	White Board	2 buah	Rusak Berat : 2 buah Tahun Pembelian : 2012
30	Termometer	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2020
31	Kotak Surat	5 buah	Rusak Berat : 5 buah Tahun Pembelian : 2016
32	Papan Pengumuman	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2016
33	Meja Kerja Kayu	8 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2016 Rusak Berat : 6 buah Tahun Pembelian : 2009, 2012, 2014
34	Meja Rapat	15 buah	Baik : 14 buah Tahun Pembelian : 2016, 2021, 2023 Rusak Berat : 1 buah Tahun : 2015
35	Meja Komputer	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2021
36	Kursi Rapat	8 buah	Baik : 8 buah Tahun Pembelian : 2014
37	Kursi Putar	15 buah	Baik : 15 buah Tahun Pembelian : 2021
38	Kursi Lipat	106 buah	Baik : 50 buah Tahun Pembelian : 2009 Rusak Berat : 56 buah Tahun Pembelian : 2015, 2016
39	Sofa	3 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2023 Rusak Berat : 2 buah Tahun Pembelian : 2009, 2017
40	Alat Penghancur Kertas	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2015
41	Alat Tenis Meja	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2018
42	Jam	6 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2016 Rusak Berat : 4 buah Tahun Pembelian : 2013, 2014
43	Vacuum Cleaner	6 buah	Rusak Berat : 6 buah Tahun Pembelian : 2017
44	Lemari Es	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2010

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
45	Kipas Angin	4 unit	Baik : 2 unit Tahun Pembelian : 2018, 2019 Rusak Berat : 2 unit Tahun Pembelian : 2015
46	Exhause Fan	4 buah	Baik : 4 buah Tahun Pembelian : 2018
47	Tabung Gas	2 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2018
48	Megaphone	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2019
49	Microphone	2 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2017
50	Unit Power Supply	2 unit	Rusak Berat : 2 unit Tahun Pembelian : 2014
51	Dispenser	4 unit	Rusak Berat : 4 unit Tahun Pembelian : 2019
52	Mimbar/Podium	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2021
53	Vertical Blind	129 buah	Rusak Berat : 129 buah Tahun Pembelian : 2010, 2013, 2014, 2017
54	Gordyn/Kray	61 buah	Baik : 31 buah Tahun Pembelian : 2023 Rusak Berat : 30 buah Tahun Pembelian : 2018
55	Meja Kerja Eselon III	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2016
56	Meja Kerja Eselon II	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2014
57	Kursi Eselon III	3 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2014 Rusak Berat : 1 buah Tahun Pembelian : 2009
58	Kursi Eselon IV	2 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2015
59	Kursi Pegawai	10 buah	Baik : 10 buah Tahun Pembelian : 2009
60	Lemari Buku Eselon III	2 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2015
61	Audio Amplifier	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2014

Sumber : Bakesbangpol

C. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selama periode 2021–2024, Bakesbangpol menunjukkan capaian sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan jumlah ormas yang aktif 8,75% (2022) menjadi 8,20 (2024). Meskipun nilai persentase menurun, tetapi jumlah ormas yang aktif meningkat. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan definisi operasional terkait ormas aktif, dimana tercatat 87 ormas aktif tahun 2022 dan 211 di tahun 2024.
2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu mengalami peningkatan, dimana tahun 2019 mencapai 84,81% dengan jumlah pengguna hak pilih Pemilu 125.097 orang, tahun 2024 sebesar 86,63% dengan jumlah pengguna hak pilih Pemilu 133.760 orang. Adanya kegiatan Pendidikan politik bagi pemilih pemula yang selalu diadakan setiap tahun dapat mendukung tercapainya indikator tersebut.
3. Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial berjalan secara rutin, sehingga tercatat adanya potensi konflik sebesar 136 di tahun 2022 dan menurun di tahun 2024 menjadi 29 potensi konflik.

Berikut merupakan tabel capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tujuan : Meningkatnya stabilitas wilayah															
	Sasaran : Meningkatnya kondusifitas wilayah															
	Persentase Potensi konflik berlatarbelakang sosial politik yang dapat dicegah	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5,05	N/A	N/A	N/A	N/A	101	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tujuan:Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila															

	Indeks Stabilitas	N/A	N/A	74,5	76,05	77,75	N/A	N/A	86,16	89,68	81,65	N/A	N/A	115,65	117,92	105,01
	Sasaran : Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah															
	Persentase Peningkatan Jumlah Ormas yang Aktif	N/A	3	3	3	3	N/A	2,97	8,75	4,28	8,20	N/A	99	291.66	142,66	273,33
	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	74	N/A	N/A	N/A	85	75,78	N/A	N/A	N/A	86,63	102,40	N/A	N/A	N/A	114,31
	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	N/A	20	20	20	20	N/A	N/A	72,72	19,44	20,69	N/A	N/A	97,20	103,45	N/A

Sumber : LKjIP dan LKPJ Bakesbangpol

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN SOSIAL	253.397.400					245.026.900					96,70						
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGUATAN KETAHANAN BANGSA	132.440.750					120.745.750					91,17						
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2.220.933.000					1.757.120.500					79,12						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			450.069.500	583.791.760	1.146.914.900			417.010.699	517.538.500	1.089.015.357			92,65	88,65	94,95	0,52	0,54
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN		653.196.000	913.280.330	1.814.924.500	27.751.625.318		632.754.000	879.503.330	1.801.053.194	27.692.707.908		96,87	96,30	99,24	99,79	10,37	10,69
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		347.343.720	388.485.540	126.417.200	95.847.800		288.599.280	314.173.740	102.777.194	63.670.000		83,09	80,87	81,30	66,43	-0,18	-0,19
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			554.073.590	954.803.100	449.055.300			496.534.980	892.744.754	429.783.200			89,62	93,50	95,71	-0,06	-0,04
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		4.158.303.728	2.795.294.530	3.894.574.360	3.031.480.300		2.095.191.160	2.578.025.010	3.230.063.582	2.923.126.520		50,39	92,23	82,94	96,43	-0,07	0,10

Sumber : LKPJ dan Monev Bakesbangpol

D. Kelompok sasaran layanan

Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum, khususnya dalam bidang ideologi, politik, kewaspadaan dini, dan ketahanan nasional, memiliki beragam kelompok sasaran layanan. Sasaran ini mencerminkan keberagaman peran Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas dan ketahanan masyarakat. Berikut tabel kelompok sasaran layanan Bakesbangpol. Berikut merupakan kelompok sasaran pelayanan Bakesbangpol

1. Masyarakat Umum

   Kelompok ini merupakan sasaran utama dalam upaya pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila, serta peningkatan toleransi dan kerukunan. Pelayanan yang diberikan meliputi sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, penanggulangan radikalisme, serta pendidikan politik.
2. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

   Ormas merupakan mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi dan menjaga stabilitas sosial-politik. Bakesbangpol memberikan pelayanan berupa fasilitasi pendataan, pembinaan, serta pemberian bantuan hibah atau penguatan kapasitas untuk mendorong kontribusi positif Ormas dalam pembangunan nasional.
3. Partai Politik (Parpol)

   Sebagai pilar demokrasi, partai politik mendapat layanan dalam bentuk fasilitasi pendidikan politik, bantuan keuangan partai politik, serta pembinaan terhadap tertib administrasi dan pelaporan penggunaan dana bantuan. Bakesbangpol juga mengawasi keberadaan dan aktivitas partai sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pemilih Pemula (Pelajar dan Mahasiswa)

   Kelompok usia muda seperti pelajar SMA/SMK dan mahasiswa menjadi sasaran dalam rangka pembinaan karakter kebangsaan dan pendidikan politik sejak dini. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi pemilu, pelatihan kader pemimpin muda, serta penguatan wawasan kebangsaan.

5. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tokoh Agama
   Kelompok ini penting dalam menjaga toleransi antarumat beragama. Bakesbangpol memberikan dukungan fasilitasi kegiatan FKUB, pelatihan mediasi konflik keagamaan, serta forum-dialog lintas iman untuk menciptakan harmoni sosial.
6. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat
   Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam komunitas lokal. Bakesbangpol memberdayakan mereka melalui forum-forum dialog, pelatihan kepemimpinan, dan pelibatan aktif dalam deteksi dini potensi konflik sosial.
7. Aparatur Pemerintah Daerah dan Forkopimda
   Sebagai mitra koordinatif, Bakesbangpol memberikan pelayanan berupa sinergi lintas sektor, pemantauan dinamika politik lokal, fasilitasi rapat koordinasi keamanan dan ketertiban, serta penyusunan kebijakan strategis kewaspadaan dini.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila.
b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi
c. Lemahnya deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas politik dan keamanan

Berikut ini merupakan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Penguatan Ketahanan Ideologi Pancasila
   Meningkatkan literasi ideologi dan nasionalisme di kalangan masyarakat.
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi

Agar demokrasi berjalan substantif, tidak sekadar prosedural.

3. Peningkatan Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Sosial

   Membentuk jejaring intelijen sosial berbasis masyarakat dan perangkat daerah.

Adapun Teknik menyimpulkan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Bakesbangpol

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila	Kondusivitas dan Keamanan Wilayah untuk Pembangunan Berkelanjutan	Penyebaran radikalisme dan ekstremisme global melalui internet dan media sosia	Tantangan revitalisasi nilai kebangsaan di kalangan generasi muda	eningkatnya potensi konflik sosial dan intoleransi antarwilayah di tingkat provinsi akibat perbedaan pandangan politik, sosial, dan budaya.	Penguatan Ketahanan Ideologi Pancasila
Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi	Kurangnya kesadaran generasi penerus muda terkait politik	Perkembangan demokrasi global yang menghadapi tantangan disinformasi dan polarisasi politik melalui media digital.	Penguatan partisipasi publik dalam proses demokrasi untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan musyawarah daerah di tingkat provinsi akibat kurangnya literasi politik.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi
Lemahnya deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas politik dan keamanan	Lemahnya deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas politik dan keamanan	Kondusivitas dan keamanan wilayah sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.	Ancaman keamanan non-tradisional seperti radikalisme, kejahatan siber, dan terorisme lintas negara.	Penguatan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi ancaman stabilitas politik dan keamanan nasional.	Kerentanan stabilitas politik dan keamanan di tingkat provinsi akibat lemahnya koordinasi lintas	Peningkatan Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					sektor dan lintas daerah.	

Sumber : Bakesbangpol

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2025-2029 sebagai berikut:

PASURUAN KOTA ANUGRAH

" Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, dan Indah Kotanya"

Untuk mewujudkan visi di atas, didukung misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang rensponsif dan merata berbasis digital
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan dan harmonisasi sosial
5. Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan memiliki peran penting dalam mendukung misi ke empat yaitu 4 meningkatkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan dan harmonisasi sosial. Untuk mencapai misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah merumuskan Tujuan yaitu " Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun ". Tujuan tersebut memiliki indikator Indeks Keharmonisan Sosial, dengan harapan dapat mengukur tingkat keharmonisan antar kelompok masyarakat.

3.2 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Toleransi Masyarakat memiliki definisi operasional menilai seberapa besar toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama, etnis, dan budaya. Indikator sasaran adalah Indeks Toleransi
b. Meningkatnya Keterlibatan Komunitas memiliki definisi operasional mengukur seberapa banyak lembaga (Ormas, Lembaga Ekososbud, Lembaga Pendidikan dan Parpol) yang terlibat dalam kegiatan pembinaan di Bakesbangpol. Indikator sasaran adalah Indeks Keterlibatan Komunitas
c. Menurunnya konflik sosial di masyarakat memiliki definisi operasional Mengukur Jumlah insiden konflik yang terjadi di Kota Pasuruan, terdiri dari beberapa jenis konflik yaitu:
    1. cek-cok/tawuran antar warga
    2. Pencurian/pelanggaran hukum ringan
    3. Tawuran/keributan/pengeroyokan
    4. Pelanggaran norma/tatib umum
    5. SARA/konflik antar kelompok besar

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya stabilitas sosial	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun		Indeks Keharmonisan Sosial	59,83	60,00	61,00	61,67	62,67	63,33	
Meningkatnya toleransi sosial		Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	89,5	90	91	92	93	93	
		Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	45	47	52	55	58	62	
		Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	45	43	40	38	37	35	

Sumber : IKU Bakesbangpol

3.3 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 adalah :

- Strategi awal tahun periode Renstra
  - Penyusunan roadmap pembinaan wawasan kebangsaan
  - Sosialisasi masif nilai Pancasila ke pelajar dan masyarakat
  - Meningkatkan kapasitas tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah.
  - Pelatihan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Ormas
  - Koordinasi Forkopimda dan penguatan kewaspadaan dini

- Digitalisasi sistem deteksi konflik

- Strategi pertengahan tahun periode Renstra
  - Simulasi dan SOP penanganan konflik
  - Pemetaan daerah rawan konflik dan radikalisme
  - Terpetakannya minimal 80% wilayah rawan
- Strategi akhir tahun periode Renstra
  - Mengaktifkan forum-forum dialog lintas sektor
  - Integrasi dengan platform digital nasional

Adapun penahapan renstra Bakesbangpol disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TAHAP I (2026)	TAHAP (2027)	TAHAP III(2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pemangku Kepentingan	Peningkatan Partisipasi Politik dan Keterlibatan Komunitas	Penguatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Menyatukan langkah semua pihak dan meninjau kembali pelaksanaan program utama agar bisa lebih baik dan tepat sasaran	Menjaga program tetap berjalan terus-menerus sekaligus memperbarui program agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan zaman

Sumber : Bakesbangpol

3.4 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun	Penguatan kerukunan antar etnis, agama dan golongan	- Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan Ketahanan Sosial dan Politik Masyarakat - Penguatan Peran FKUB, FKDM, Forum Kewaspadaan dan Mitra Strategis Lain - Peningkatan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Sosial - Peningkatan Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik Masyarakat - Penataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik - Penguatan Kerukunan dan Dialog Lintas Sektor - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Bakesbangpol	

Sumber : Bakesbangpol

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Seluruh pelaksanaan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ideologi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta mencegah potensi konflik sosial di daerah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik, peningkatan kewaspadaan dini, serta penguatan kerukunan antarumat. Setiap subkegiatan disusun dengan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan pencapaian sasaran. Adapun teknik merumuskan program/ kegiatan / Subkegiatan Renstra Bakesbangpol disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya toleransi sosial	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun				Indeks Keharmonisan Sosial		
		Meningkatnya Toleransi Masyarakat			Indeks Toleransi		
			Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**- Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah** **- Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dan terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya dan terlaksananya administrasi barang berkala setiap tribulanan	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
					Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya dokumen kepegawaian berupa SKP, Anjab/ABK, PK dan PK Perubahan	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah	**Jumlah barang milik daerah yang disediakan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
					Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karater Kebangsaan**	
				Meningkatnya Pemahaman Pemuda Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Persentase Peningkatan Pemahaman Pemuda Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka	Pembentukan Paskibraka	
			Terwujudnya Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		**Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik pemilih pemula**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terimplementasinya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Persentase kebijakan di bidang politik yang terimplementasikan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	
					Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Meningkatnya Keterlibatan Komunitas			Indeks Keterlibatan Komunitas		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan		**Persentase Organisasi Masyarakat yang teregister**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	
				Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang dibina	**Persentase Organisasi Masyarakat yang mengikuti pembinaan Organisasi Kemasyarakatan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	
					Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Buday		**Persentase lembaga ekososbud yang dibina**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Persentase lembaga ekosobud yang menikuti sosialisasi bahaya narkoba**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Menurunnya konflik sosial di masyarakat			Indeks Konflik Sosial		
			Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi		**Persentase potensi konflik yang terselesaikan**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peingkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Penanganan Konflik Sosial				
				Terselesaikannya potensi konflik yang ada serta terlaksananya penanganan konflik sosial	**Persentase masyarakat yang mengikuti keg. Pembinaan Kewaspadaan Dini**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.583.589.689		8.514.026.410		9.109.206.900		32.425.295.122		9.359.873.525		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.829.989.091		3.898.296.352		4.177.357.243		4.187.513.865		4.263.528.241		
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,6	78,8	3.829.989.091	80	3.898.296.352	81,2	4.177.357.243	82,4	4.187.513.865	83,5	4.263.528.241	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	0	3		3		3		3		3			
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	11	26.620.500	11	21.391.965	11	22.461.563	12	23.584.641	12	24.763.873		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	26.620.500	5	21.391.965	5	22.461.563	5	23.584.641	5	24.763.873		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.134.100		16.681.245		17.515.307		18.391.073		19.310.626		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	22.134.100	6	16.681.245	6	17.515.307	6	18.391.073	6	19.310.626		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.299.600		2.414.580		2.535.309		2.662.074		2.795.178		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	2.299.600	5	2.414.580	5	2.535.309	5	2.662.074	5	2.795.178		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.186.800		2.296.140		2.410.947		2.531.494		2.658.069		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.186.800	1	2.296.140	1	2.410.947	1	2.531.494	1	2.658.069		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	0	17	3.013.685.641	17	3.148.549.994	17	3.391.123.565	17	3.363.297.407	17	3.398.603.114		
Tersusunnya dan terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	22	3.013.685.641	22	3.148.549.994	22	3.391.123.565	22	3.363.297.407	22	3.398.603.114		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	16	16		17		17		17		17			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.982.467.041		3.115.770.464		3.356.705.058		3.327.157.975		3.360.656.711		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	22	2.982.467.041	22	3.115.770.464	22	3.356.705.058	22	3.327.157.975	22	3.360.656.711		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				31.218.600		32.779.530		34.418.507		36.139.432		37.946.403		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	16	16	31.218.600	17	32.779.530	17	34.418.507	17	36.139.432	17	37.946.403		
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	6	35.511.400	6	37.286.970	6	39.151.319	6	41.108.884	6	43.164.329		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya dan terlaksananya administrasi barang berkala setiap tribulanan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	35.511.400	4	37.286.970	4	39.151.319	4	41.108.884	4	43.164.329		
8.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				35.511.400		37.286.970		39.151.319		41.108.884		43.164.329		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	35.511.400	4	37.286.970	4	39.151.319	4	41.108.884	4	43.164.329		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	0	4	1.800.000	4	1.890.000	4	1.984.500	4	2.083.725	4	2.187.911		
Tersusunnya dokumen kepegawaian berupa SKP, Anjab/ABK, PK dan PK Perubahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	6	1.800.000	4	1.890.000	4	1.984.500	4	2.083.725	4	2.187.911		
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.800.000		1.890.000		1.984.500		2.083.725		2.187.911		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	6	1.800.000	4	1.890.000	4	1.984.500	4	2.083.725	4	2.187.911		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	0	12	142.607.500	12	107.769.270	12	113.157.735	12	118.815.620	12	124.756.401		
Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	142.607.500	12	107.769.270	12	113.157.735	12	118.815.620	12	124.756.401		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	2		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	12		1		1		1		1			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.969.900		7.284.060		7.648.263		8.030.676		8.432.210		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	7.969.900	2	7.284.060	2	7.648.263	2	8.030.676	2	8.432.210		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		12.388.110		13.007.516		13.657.891		14.340.786		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	2	15.000.000	12	12.388.110	12	13.007.516	12	13.657.891	12	14.340.786		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.204.400		1.157.310		1.215.176		1.275.934		1.339.731		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	12	2.204.400	1	1.157.310	1	1.215.176	1	1.275.934	1	1.339.731		
8.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	1	6.077.531		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.433.400		13.055.070		13.707.824		14.393.215		15.112.875		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4	13.433.400	12	13.055.070	12	13.707.824	12	14.393.215	12	15.112.875		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				98.999.800		68.634.720		72.066.456		75.669.779		79.453.268		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	98.999.800	12	68.634.720	12	72.066.456	12	75.669.779	12	79.453.268		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	0	13	78.445.800	12	63.853.440	11	67.046.112	12	70.398.418	11	73.918.338		
Tersedianya barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	5	78.445.800	5	63.853.440	5	67.046.112	5	70.398.418	5	73.918.338		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.445.800		63.853.440		67.046.112		70.398.418		73.918.338		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	5	78.445.800	5	63.853.440	5	67.046.112	5	70.398.418	5	73.918.338		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	0	12	364.788.250	12	380.498.213	12	399.523.124	12	419.499.279	12	440.474.243		
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	364.788.250	12	380.498.213	12	399.523.124	12	419.499.279	12	440.474.243		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				92.933.000		97.579.650		102.458.633		107.581.564		112.960.642		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	92.933.000	12	97.579.650	12	102.458.633	12	107.581.564	12	112.960.642		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				271.855.250		282.918.563		297.064.491		311.917.715		327.513.601		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	271.855.250	12	282.918.563	12	297.064.491	12	311.917.715	12	327.513.601		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	0	26	166.530.000	24	137.056.500	24	142.909.325	24	148.725.891	24	155.660.032		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	7	166.530.000	7	137.056.500	7	142.909.325	7	148.725.891	7	155.660.032		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	20		15		15		15		15			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				44.370.000		34.524.000		36.250.200		38.062.710		39.965.846		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	1	44.370.000	1	34.524.000	1	36.250.200	1	38.062.710	1	39.965.846		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.160.000		50.190.000		52.699.500		55.334.475		58.101.199		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	7	70.160.000	7	50.190.000	7	52.699.500	7	55.334.475	7	58.101.199		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.800.000		11.182.500		11.741.625		12.328.706		12.945.142		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	20	12.800.000	15	11.182.500	15	11.741.625	15	12.328.706	15	12.945.142		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.200.000		41.160.000		42.218.000		43.000.000		44.647.845		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	39.200.000	1	41.160.000	1	42.218.000	1	43.000.000	1	44.647.845		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				998.471.400		941.551.631		1.002.783.905		1.021.335.069		1.050.546.340		
Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0	90	998.471.400	90	941.551.631	95	1.002.783.905	95	1.021.335.069	95	1.050.546.340	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Pemuda Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	80	998.471.400	80	941.551.631	90	1.002.783.905	90	1.021.335.069	90	1.050.546.340		
Meningkatnya Pemahaman Pemuda Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Paskibraka (Orang)	74	74	998.471.400	74	941.551.631	74	1.002.783.905	74	1.021.335.069	74	1.050.546.340		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	50		100		100		100		100			
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15.553.000		16.330.650		17.147.183		18.004.542		18.904.769		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	50	15.553.000	100	16.330.650	100	17.147.183	100	18.004.542	100	18.904.769		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				982.918.400		925.220.981		985.636.722		1.003.330.527		1.031.641.571		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	74	74	982.918.400	74	925.220.981	74	985.636.722	74	1.003.330.527	74	1.031.641.571		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.433.054.598		1.368.192.980		1.466.135.547		24.726.292.748		1.496.379.158		
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik pemilih pemula (%)	0	73,3	1.433.054.598	80	1.368.192.980	86,6	1.466.135.547	93,3	24.726.292.748	100	1.496.379.158	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan di bidang politik yang terimplementasikan	0	39	1.433.054.598	39	1.368.192.980	39	1.466.135.547	39	24.726.292.748	39	1.496.379.158		
Terimplementasinya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0	85	1.433.054.598	135	1.368.192.980	135	1.466.135.547	135	24.726.292.748	135	1.496.379.158		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.244.638.100		1.179.776.482		1.268.298.224		24.528.455.425		1.298.541.835		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.244.638.100	1	1.179.776.482	1	1.268.298.224	1	24.528.455.425	1	1.298.541.835		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				188.416.498		188.416.498		197.837.323		197.837.323		197.837.323		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0	85	188.416.498	135	188.416.498	135	197.837.323	135	197.837.323	135	197.837.323		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				311.859.400		274.503.525		294.153.955		294.869.147		300.221.796		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang teregister (%)	0	89	311.859.400	90	274.503.525	91	294.153.955	92	294.869.147	93	300.221.796	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang mengikuti pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	40	20	311.859.400	20	274.503.525	20	294.153.955	20	294.869.147	20	300.221.796		
Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang dibina	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1	311.859.400	1	274.503.525	1	294.153.955	1	294.869.147	1	300.221.796		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	20	86		156		157		158		159			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	155	175		20		20		20		20			
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				97.857.000		80.501.125		84.526.181		84.866.528		89.109.855		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	155	175	97.857.000	20	80.501.125	20	84.526.181	20	84.866.528	20	89.109.855		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				206.862.500		186.862.500		202.130.879		202.130.879		202.846.615		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	20	86	206.862.500	156	186.862.500	157	202.130.879	158	202.130.879	159	202.846.615		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				7.139.900		7.139.900		7.496.895		7.871.740		8.265.326		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1	7.139.900	1	7.139.900	1	7.496.895	1	7.871.740	1	8.265.326		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				394.796.800		414.048.494		440.975.462		449.133.359		461.979.052		
MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekososbud yang dibina (%)	0	36,08	394.796.800	41,23	414.048.494	46,39	440.975.462	51,54	449.133.359	56,7	461.979.052	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase lembaga ekosobud yang menikuti sosialisasi bahaya narkoba		51,54	394.796.800	51,54	414.048.494	51,54	440.975.462	51,54	449.133.359	51,54	461.979.052		
Terlaksananya pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	40	38	394.796.800	40	414.048.494	45	440.975.462	50	449.133.359	55	461.979.052		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	200	250		250		250		250		250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				8.771.100		9.209.655		9.670.138		10.153.645		10.661.327		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	40	38	8.771.100	40	9.209.655	45	9.670.138	50	10.153.645	55	10.661.327		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				333.159.600		349.329.434		366.795.906		371.244.825		389.807.066		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	200	250	333.159.600	250	349.329.434	250	366.795.906	250	371.244.825	250	389.807.066		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)													
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				52.866.100		55.509.405		64.509.418		67.734.889		61.510.659		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1	52.866.100	1	55.509.405	1	64.509.418	1	67.734.889	1	61.510.659		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.615.418.400		1.617.433.428		1.727.800.788		1.746.150.934		1.787.218.938		
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang terselesaikan (%)	100	100	1.615.418.400	100	1.617.433.428	100	1.727.800.788	100	1.746.150.934	100	1.787.218.938	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	Persentase masyarakat yang mengikuti keg. Pembinaan Kewaspadaan Dini	0	90	1.615.418.400	90	1.617.433.428	95	1.727.800.788	95	1.746.150.934	95	1.787.218.938		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Penanganan Konflik Sosial														
Terselesaikannya potensi konflik yang ada serta terlaksananya penanganan konflik sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	0	2	1.615.418.400	2	1.617.433.428	2	1.727.800.788	2	1.746.150.934	2	1.787.218.938		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	3.000	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				112.543.500		98.170.675		122.574.898		128.703.646		135.138.825		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	112.543.500	1	98.170.675	1	122.574.898	1	128.703.646		135.138.825		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				14.874.500		15.618.225		16.399.136		17.219.093		18.080.048		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	3.000	50	14.874.500	50	15.618.225	50	16.399.136	50	17.219.093	50	18.080.048		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.342.585.500		1.370.958.883		1.439.506.827		1.443.442.275		1.469.374.845		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	0	2	1.342.585.500	2	1.370.958.883	2	1.439.506.827	2	1.443.442.275	2	1.469.374.845		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				145.414.900		132.685.645		149.319.927		156.785.920		164.625.220		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota (Dokumen)	0	1	145.414.900	1	132.685.645	1	149.319.927	1	156.785.920	1	164.625.220		

Sumber : Renstra Bakesbangpol

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Buday	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

Sumber : Bakesbangpol

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat dua program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pasuruan selama periode 2025/2029, yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,83	60,00	61,00	61,67	62,67	63,33	
2	Indeks Toleransi	Indeks	89,5	90	91	92	93	93	
3	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	45	47	52	55	58	62	
4	Indeks Konflik Sosial	Indeks	45	43	40	38	37	35	

Sumber : IKU Bakesbangpol

Berdasarkan tabel di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan satu indikator tujuan yaitu Indeks Keharmonisan Sosial, yang mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, saling menghargai, dan bebas dari konflik sosial. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan tiga indikator sasaran, yaitu:

1. Indeks Toleransi, yang mengukur tingkat penerimaan dan penghargaan masyarakat terhadap perbedaan agama, suku, ras, dan pandangan politik.
2. Indeks Keterlibatan Komunitas, yang menggambarkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebangsaan.
3. Indeks Konflik Sosial, yang menunjukkan tingkat kejadian dan intensitas konflik sosial di masyarakat.

Ketiga indikator sasaran ini saling mendukung dalam memperkuat kohesi sosial dan stabilitas daerah, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NIHIL								

Sumber : Bakesbangpol

Berdasarkan tabel 4.5, Bakesbangpol tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) karena tidak termasuk unit pelaksana program prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Kinerja Bakesbangpol diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kegiatan yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, serta arah kebijakan daerah

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, serta kerangka program dan kegiatan prioritas dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah. Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berpedoman pada kebijakan nasional dan dinamika tantangan global, nasional, dan regional.

Dalam lima tahun ke depan, Bakesbangpol dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, seperti meningkatnya polarisasi sosial, berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme, serta dinamika politik yang dapat memicu instabilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur yang mampu memperkuat integrasi nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan demokratis.

Renstra ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, antara lain meningkatnya toleransi masyarakat, meningkatnya keterlibatan komunitas dalam pembangunan, serta menurunnya potensi konflik sosial. Upaya ini akan ditempuh melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, baik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Penting untuk dipahami bahwa Renstra ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen strategis yang menjadi landasan bagi Bakesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra ini memerlukan konsistensi, keteguhan komitmen, dan integritas dari seluruh

jajaran Bakesbangpol, serta dukungan dari seluruh unsur pemerintah daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa.

Keberhasilan implementasi Renstra ini juga akan sangat ditentukan oleh mekanisme pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan secara berkala, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya proses evaluasi yang efektif, maka pencapaian sasaran strategis dapat diukur secara objektif dan dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

Akhirnya, kami berharap dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, serta mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga segala upaya dan ikhtiar yang tertuang dalam dokumen ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.